

Konsep Demokrasi Islam Dalam Pandangan Kuntowijoyo (Studi Pada Sejarah Peradaban Islam)

M. Sirajudin Fikri
(Dosen dan sekretaris SNPI Yayasan Bina
Sahabat Sriwijaya)

Abdur Razzaq
(Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN
Raden Fatah Palembang. Email:
abdurrazzaq_uin@radenfatah.ac.id)

Abstract: *Kuntowijoyo, trying to offer a concept of democracy which is based on the values contained in the Qur'an and Hadisth . Kunto provide rules contained in Islam which can be connected into the teachings of Islam . Kuntowijoyo used epistemological analysis of democracy and related it to the political dynamics of contemporary Indonesia. On one hand, Kunto accepted the concept of Western version of democracy , on the other hand Kunto gave a " soul " in the substance of democracy . Kunto combined Islamic values in the concept and practice of democracy. Quotes verses of the Qur'an were accompanied by contextual interpretation, then transformed and implemented it with the real growing Indonesia political environment.*

Keywords: Democratisation, Islamic civilization

Abstrak: Kuntowijoyo, mencoba menawarkan konsep demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadisth. Kunto memberikan aturan yang terkandung dalam Islam yang dapat dihubungkan ke dalam ajaran Islam dan menggunakan analisis epistemologis demokrasi dan menghubungkannya dengan dinamika politik Indonesia kontemporer. Di satu sisi, Kunto menerima konsep demokrasi versi Barat, di sisi lain Kunto memberi "jiwa" dalam substansi demokrasi. Kunto menggabungkan nilai-nilai Islam dalam konsep dan praktik demokrasi. Kutipan ayat-ayat Al-Qur'an disertai dengan interpretasi kontekstual, kemudian ditransformasikan dan diimplementasikan dengan lingkungan politik Indonesia yang berkembang nyata.

Katakunci: *Demokrasi, peradaban Islam*

Pendahuluan

Kuntowijoyo merupakan anak kedua dari sembilan bersaudara yang dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah dan dalam lingkungan seni. Dua lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhannya semasa kecil dan remaja. Kunto berasal dari struktur *priyai*, karena kakeknya pernah menjabat sebagai lurah. Sebagai seorang sejarawan, Kunto sangat menghargai kearifan dan budaya Jawa. Kecintaan Kunto terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan sejarah, telah banyak mengajarkan pentingnya sifat arif dan bijaksana. Kedua sifat ini diimplementasikan Kunto dalam kehidupan sehari-hari. (Agus Noer, 24 September 2013)

Kunto yang memiliki karismatik tersendiri mendapat tempat tersendiri dihati masyarakat banyak, terutama kalangan pecinta ilmu pengetahuan. Bahkan, dengan latar belangan yang unik ini tidak heran jika ada yang menyebut Kunto sebagai seorang modernis, tradisional, reformis, dan konservatif sekaligus (Idi Subandi Ibrahim, 1 Maret 2014). Latar belakang ini pula yang kemudian menjadikan Kunto merasa wajib "*atas nama keluarga*", katanya menolak trikotomo masyarakat jawa menjadi tiga golongan *priyai*, *abangan* dan *santri*. Sebagaimana tesis dari Clifford Geertz. Menurut Kunto (hasil wawancara Arif Subhan yang dikutip M. Fahmi 2005, hal 31).

Karya-Karya Kuntowijoyo

Paradigma Islam dan Politik Islam, Intelektualisme Muhammadiyah: Menyongsong Era Baru, Identitas Politik Umat Islam, sungguh mencerminkan kecerdasan, kejujuran dan integritasnya sebagai seorang intelektual muslim.

Para mahasiswanya juga memandangnya seorang guru yang bijaksana. Meski dalam kondisi sakit, ia tetap mau merelakan waktunya untuk membimbing mahasiswanya.

Kendati sebagaimana hari-hari (puluhan tahun) dijalannya dalam keadaan sakit, sampai menjelang akhir hayat, Kunto telah berhasil menulis lebih dari 50 judul buku. Belum terhitung kolom-kolomnya di berbagai media. Tak jarang pula bukunya mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan intelektual. Seperti buku, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (1991) dan *Identitas Politik Umat Islam*, terbitan Mizan, Bandung, 1997. Sebuah penuangan pemikiran yang mampu menerjemahkan konsep perjuangan ke dalam langkah nyata.

Konsep Demokrasi Dalam Islam dalam pandangan Kuntowijoyo

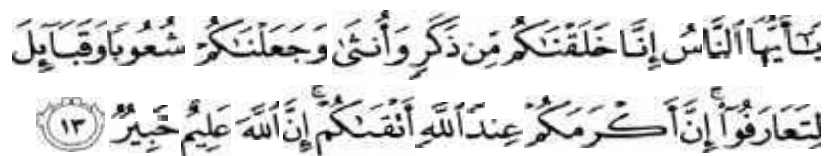
Demokrasi adalah bentuk kenegaraan yang secara konsekuen mengakui kesamaan hakiki antar manusia. Demokrasi, sebagai "kekuasaan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, secara jelas menjelaskan bahwa tidak ada elit yang berkuasa. Kekuasaan yang diterima oleh para elit, merupakan kuasa yang harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat (Bahtiar Efendi, 2005. Hal 15).

Menurut Kuntowijoyo ada beberapa konsep yang dibicarakan mengenai demokrasi dan nilai-nilai yang demokrasi yang terdapat dalam Islam yaitu :

1. Konsep saling mengenal atau *Ta'arruf*
2. Konsep musyawarah atau *Syura*
3. Konsep kerja sama atau *Ta'awun*
4. Konsep meguntungkan masyarakat atau *Mashlahah*
5. Konsep adil atau *'Adl*
6. Konsep perubahan atau *Taghyir*

Konsep Saling Mengenal Atau *Ta'arruf*

Kunto memulai dengan mempelajari makna yang tersirat dalam surat Al-Hujurat (49: 13) yang berbunyi:



"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Kunto, (1997, hal 92) setidaknya ada dua pengertian dari ayat tersebut, *pertama* pada mulanya manusia itu satu, yang menjadikan

manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ialah Tuhan, dan yang mengukur kemuliaan ialah Tuhan. Jadi ada lingkaran yang berawal dan berakhir pada Tuhan, Teosentrisme. *Kedua*, manusia secara objektif memang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Manusia itu secara ontologis (berdasar kenyataan) memang mamhluk sosial, sehingga berkelompok dalam bangsa dan suku. Dalam istilah "bangsa dan suku" mesti dimasukkan agama, kelas, budaya, partai dan sebagainya. dengan kata lain, Islam mengajarkan untuk berfikir dan berperilaku objektif, dalam ayat ini jelas bahwa filsafat sosial Islam, termasuk hukum, etika, ekonomi dan politik adalah objektivitas teosentris.

Dari pengertian '*arafa* ini Kunto (1997, hal 92-93) membagi empat pengertian besar. *Pertama Ta'arruf* hanya berjalan kalau ada *equality*, persamaan. Tidak ada warga negara yang dinomor duakan. Dalam sejarah Islam memang dikenal golongan non muslim (*ahludz-dzimah*) yang ada di suatu wilayah yang ditaklukkan, atau yang membuat perjanjian dengan penguasa Muslim, atau berada dalam wilayah muslim karena sebab lainnya. *Kedua, Ta'arruf*, mempunyai asumsi adanya liberty, kemerdekaan. Dalam masyarakat zaman dahulu di Indonesia yang terdiri dari *wong agung* (orang besar) dan *wong cilik* (orang kecil) dari masa "*feodalisme*" atau masyarakat kolonial yang terdiri dari *colonizer* (penjajah) dan *colonized* (terjajah) yang mempunyai kedudukan hukum yang berbeda, kemerdekaan penuh tidak diberikan kepada yang di bawah. *Self development* (yang menjadi dasar demokrasi budaya dan demokrasi agama) yang bebas tidak mungkin. *Ketiga, Ta'aruf* juga berarti adanya komunikasi dialog tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Semua hal diselenggarakan berdasarkan kepentingan pihak-pihak yang terkait, tidak monologis oleh kelompok mayoritas yang dominan. *Keempat, Ta'arruf* mempunyai asumsi negara hukum. Hukum positif yang diketahui bersama mencegah pandangan tentang relativitas nilai-nilai. Kelompok-kelompok sosial dengan latar belakang sejarah, kepentingan, dan tujuan berbeda menyebabkan perbedaan pandangan.

Konsep Musyawarah atau Syura'

Musyawarah diwajibkan dalam Islam, karena itu bagi umat Islam komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi. Ada satu surah khusus dalam Al-Qur'an yang diberi judul Asy-Syura dan setidaknya ada dua ayat yang menyangkut permusyawaratan dalam masyarkat. Selain itu orang bisa belajar mengenai praktek musyawarah dari sunnah. Musyawarah disebut bersamaan dengan shalat dan zakat, dengan demikian musyawarah termasuk tanda-tanda orang beriman. Dalam surah Asy-Syura (42):38 dikatakan :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذْ دَعَوْهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْأَنْعَامِ وَأَنَّهُمْ سَمِعُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

Kalau dalam ayat di atas musyawarah dikerjakan oleh orang-orang Islam, maka dalam Ali-Imran (3): 159 di bawah ini musyawarah juga diharuskan kepada musuh-musuh Islam :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِنَّكَ
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Sebagai mana yang dikutip oleh Abu A'la Al-Maududi (1993, hal 95), dari Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya mengatakan hal itu adalah salah satu tanda bahwa Islam adalah *"rahmat untuk alam semesta"*. Bayangkanlah, keharusan lemah lembut, memaafkan, memohonkan ampunan, dan musyawarah itu justru diwajibkan waktu semestinya orang Islam mendendam setelah dibantai dalam Perang Uhud.

Kunto mencontohkan (1998, hal 96), Nabi dalam praktik pemerintahan sangat menghargai musyawarah. Sebagai contoh, pada saat menjelang terjadinya perang Uhud antara pihak Nabi di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah. Ketika itu, ada dua pendapat dalam tubuh ummat muslim, yaitu: bertahan dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Nabi, kemudian mengadakan musyawarah dengan kaum muslim untuk menentukan pilihan. Nabi sendiri berpendapat bahwa lebih baik bertahan dalam kota. Tetapi, mayoritas kaum muslim menghendaki berperang dengan musuh di luar kota. Yang menarik, menjelang peperangan ini ialah adanya musyawarah, Nabi menerima pendapat dari mayoritas suara. Meskipun dalam pertempuran itu kaum muslim kalah, musyawarah juga yang menentukan. Ini berarti dalam musyawarah proses lebih penting dari hasil. Ini juga berarti bahwa suara minoritas betapapun kuat klaimnya atas kebenaran harus tunduk pada suara mayoritas.

Tapi bagi umat Islam musyawarah itu masih tidak boleh melanggar hak Tuhan dan Rasul-Nya. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mutlak harus berlaku dan tidak ada musyawarah. Misalnya, soal homoseksualitas dan lesbianisme bukan suara mayoritas yang menentukan, tapi Tuhan. Itulah

beda musyawarah dalam Islam dan demokrasi sekular. Kadang-kadang perbeaan itu dipertajam oleh pertentangan politik. Imam Khomeini pernah mengecam demokrasi (barat), sedangkan Amerika menganggap Iran sebagai teokrasi yang mundur tiga belas abad. Bagaimana mungkin seorang yang menulis tentang cara wudhu dan mandi dapat memimpin sebuah revolusi ?

Di tingkat nasional tradisi musyawarah masih sangat muda. Baru tahun 1918 ada Valskraad, dilanjutkan dengan Cou Sangi In pada Zaman Jepang. Indonesia baru mengenal Pemilu pada tahun 1955, sebelum itu partai-partai duduk dalam lembaga-lembaga permusyawaratan berdasarkan perkiraan. Dibandingkan dengan Amerika yang sudah ada tradisi demokrasi sejak awal, yaitu di kota-kota New England pada abad ke-17, tradisi musyawarah di Indonesia masih sangat muda. Karena itu bisa dipahami kalau masih tertatih-tatih.

Konsep Kerja Sama atau *Ta'awun*

Dalam surat Al-Maidah (5) : 2 disebutkan :

..... نِعْمَ رُؤُوفٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَ لَا يُنصَرُونَ إِلَّا لِقَاءَ اللَّهِ عَظِيمٍ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Kunto menggunakan ayat ini untuk memberikan penekanan pada pentingnya kerja sama. Konsep demokrasi yang ideal adalah praktek kenegaraan yang di dalamnya terjalin hubungan kerja sama yang baik dan jujur antara pemerintah dan rakyat. Secara garis besar, ayat di atas menyiratkan adanya dua kepentingan yang diharuskan untuk bekerja sama, yaitu kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Biasanya orang berbicara tentang demokrasi dalam pengertian demokrasi politik, yaitu tidak ada hambatan dari kekuasaan. Demokrasi yang dimengerti secara negatif, berarti "merdeka dari". Islam mengingatkan pengertian yang lebih dari itu, demokrasi perlu diperluas menjadi kerjasama antar warga, "merdeka untuk", yaitu demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Bangsa Indonesia adalah satuan yang secara objektif ada, merupakan *self evident truth* yang tak terbantah. Tetapi, itu tidak berarti bahwa satuan yang besar (masyarakat) lebih penting dari satuan yang kecil (individu). Karena, keduanya adalah satuan -satuan yang objektif, dimana rakyat adalah sosialisme (ekonomi terpusat, perencanaan sentral, dan intervensi negara), sedangkan individu adalah kapitalisme (ekonomi pasar bebas).

Manusia berhak khawatir dengan perkembangan mutakhir. Sementara konsep *Ta'awun* secara nasional belum selesai, Indonesia akan menghadapi tatanan baru yang bersifat internasional. Persoalan yang akan

dihadapi bersama ialah berlomba dengan waktu. Sebelum tatanan internasional itu berlaku pada tahun 2020, *Ta'awun* nasional harus sudah selesai. Runtuhnya komunisme di Eropa Timur yang tidak berarti bahwa cita-cita sosialisme sudah runtuh, seolah-olah memberi kesempatan bagi sistem kapitalis untuk berkembang. Hal itu juga memberi kesempatan dan tantangan baru bagi sistem sosial yang berjalan sesuai dengan jalan demokrasi, tapi tetap merupakan masyarakat *ta'awun*.

Pancasila mempunyai potensi sebagai sistem alternatif. *Ta'awun* nasional hanya dapat berjalan jika dapat menghasilkan dualisme ekonomi, monopoli, oligopoli, nepotisme, dan *ersatz capitalism*, serta mempunyai pemerintah yang bersih (tanpa korupsi dan kolusi). Syarat pertama ke arah itu ialah adanya *syura* yang aktif melakukan kontrol terhadap kekuasaan.

Ta'awun itu dapat pula menjadi kaidah bagi persekutuan yang bersikap mikro, (Kunto 2006, hal. 99). Misalnya dalam satu pabrik atau perusahaan. *Self management* pekerja dan pemilikan aset-aset perusahaan oleh karyawan, akan meningkatkan tanggung jawab karyawan pada perusahaan, suatu hal yang sangat baik dalam era yang penuh kompetisi. Jadi *Ta'awun* antara pemilik modal dan pemrakarsa dengan karyawan. Meskipun itu sukar dilaksanakan, kiranya merupakan eksperimen sosial-ekonomi yang perlu di coba. Perhitungan bisnis yang rasional (*zweck rational*) tentu memperhitungkan efisiensi dan efektivitas, sehingga pemilikan aset perusahaan oleh karyawan akan lebih berguna dari pada intensif lainnya. *Ta'awun* yang bermula dari keadaan normatif, perlu dasar legal-rasional melalui proses demokratis.

Menurut Kunto sebagian prinsip *ta'awun* sudah terlaksana, ada yang lama, ada yang baru. Gerakan koperasi sudah kita kenal sejak zaman kolonial, SI (Syarikat Islam) sudah menjalankannya. Konsep perusahaan hulu-hilir, anak asuh perusahaan, santunan lansia, gerakan orang tua asuh, beasiswa, merupakan bentuk-bentuk baru kerja sama.

Konsep Menguntungkan Masyarakat atau *Mashlahah*

Pengertian kata *mashlahah* sama dengan kata *shalih* yang berarti "baik", menurut agama. Pada Al-Qur'an banyak dijumpai kata shalih dan kata jadinya. *Shalih* atau saleh dapat berarti kebaikan pada umumnya, menguntungkan. Disinilah orang sering berbicara agama sebagai *moral force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang biasanya akan berbicara tentang *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan, mencegah kejahatan) bila menyinggung peranan agama. Agama dapat berperan sebagai *moral force* supaya orang berbuat baik. Peran agama tidak langsung, tetapi melalui individu atau kebudayaan. Menurut Kunto (1997, hal. 100) kalimat *amar ma'ruf nahi munkar* itu justru dibuat untuk menyatakan bahwa agama dapat berperan langsung, tapi melalui proses objektivikasi. Agama-agama dapat berpengaruh dalam struktur dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam demokratisasi.

"*Kesalahan*" orang beragama ialah memandang masalah politik itu masalah sederhana, semua masalah akan selesai, jika semua orang berbuat baik. (Kunto 1997, hal 100). Tapi, kata shalih akan berbeda pengertiannya jika disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang tidak sama. Contoh: kata

shalih dari majikan berbeda pengertiannya dengan perbuatan shalih dari karyawan, penguasa berbeda dengan rakyat, elite berbeda dengan massa, polisi berbeda dengan pedagang K-5. Dalam demokrasi, mayoritas mesti di prioritaskan, juga dalam kriteria keshalihan. Untuk masalah kriteria, rumusan "the greatest happiness for the greatest number" adalah rumusan demokrasi yang lazim.

Konsep Adil atau 'Adl

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak. Dalam Surah An-Nisa' (4) : 58 tentang Keadilan Allah menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ أَنْتُمْ دُرُورًا الْأَمَانَاتِ
 إِهْلِي ۖ حَكْمَتُمْ بَيْنَهُ سَأَلْتُمْ
 أَهْلِهَا وَذَلِكَ اللَّهُ
 بِالْعَدْلِ
 نَبِيًّا نَبِيًّا بِعَظْمِكُمْ يَهْدِي
 كَمَا سَمِعْتُمْ بِصِدْقِهِ
 اللَّهُ يَرَى

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*".

Selanjutnya, dalam Surah Al-An'am (6): 152 dikatakan :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَآتُوا
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكُلُوا مِمَّا كَسَبَتْ شُعْبَاهُ ۖ وَتَكُلُوا مِمَّا
 كَسَبَتْ يَدَاكُمْ ۚ إِنَّكُمْ لَعِندَ اللَّهِ أَوْفَىٰ
 تَعَادَلُوا ۚ كَانُوا ۚ ذُنُوبُهُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*".

Pentingnya berbuat adil dalam ajaran agama Islam diperkuat dengan adanya hadis Nabi yang mengatakan: "Seandainya Fatimah mencuri, pasti kupotong tangannya". Jelas sekali tuntunan untuk berlaku adil dalam Islam, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kunto(1997, hal. 102), pernah mengutip dari tulisan M. Quraish Shihab, ada empat makna keadilan, yaitu: sama, seimbang, perhatian kepada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu

kepada setiap pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Allah. Adil yang bermula dari sikap personal, harus terlebih dahulu dijadikan produk legal.

M. Sirajudin Fikri, Konsep Demokrasi Islam.....

Sehubungan dengan demokrasi, Kunto (1997: 102) mengemukakan akan mengemukakan dua macam keadilan, yaitu *distributive justice* dan *produktive justice*, yang masing-masing menjadi dasar Demokrasi Sosial dan demokrasi Ekonomi. Dalam masyarakat industrial, asumsinya adalah bahwa seluruh warga negara pernah, sedang, dan akan terlibat dalam produksi masyarakat. Mereka semua berhak mendapatkan santunan. Negara, sebagai pemilik kerja masyarakat, wajib memberi santunan pada seluruh warga yang terlibat dalam proses produksi. Kita sampai pada kesimpulan perlunya *distributive justice*, keadilan distributif di mana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas hasil kerjanya (Bernard Lewis, 2002 hal 7).

Kunto, mencontohkan dalam masyarakat industrial kerja telah mengalami sosialisasi. Tidak seorang pun dapat bekerja sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan masyarakat. Modal, organisasi, dan tenaga kerja hanyalah faktor-faktor dalam produksi, karena itu tidak layak bagi pemilik modal untuk mengklaim sebagai satu-satunya satuan yang mempunyai hal atas nilai produksi. Dengan logika itu, sampailah kita pada *produktive justice*, di mana semua yang terlibat dalam proses produksi berhak atas jumlah tertentu aset-aset produksi. *Produktive justice* mengandaikan bahwa ada pemilikan kolektif atas aset-aset itu melalui jangka waktu tertentu yang akan diatur secara demokratis.

Beda *distributive justice* dan *produktive justice* ialah pada pelaku, bentuk, dan penerima. *distributive justice* pelakunya adalah negara, bentuknya bermacam-macam jamina, dan penerimanya adalah semua warga negara dengan kategori tertentu. *produktive justice* pelakunya adalah perusahaan, bentuknya pembagian pemilikan kekayaan perusahaan, dan penerimanya karyawan di perusahaan yang bersangkutan. Mana yang harus diprioritaskan supaya ada keadilan

Keadilan distributif atau keadilan produktif? Biasanya, transisi masyarakat itu akan lebih mendahulukan keadilan distributif, sebab keadilan itu dapat dicapai dalam sistem kapitalis. Kalau keadilan sosial menurut Pancasila bukanlah kapitalisme dan bukan pula komunisme, maka keadilan produktif harus menjadi tujuan akhir dari proses Pancasilaanisasi (Hatamar 2007, hal 19). Demokratisasi distributif dan produktif itu tidak mengganti efisiensi dan kompetisi dalam tatanan baru internasional, kalau tidak malah menguntungkan. Menurut hemat kami, penghapusan dualisme ekonomi merupakan prasyarat yang tak boleh ditawar bagi keadilan sosial. Institusi kolonial yang *inhuman* itu akan menghantui setiap kali kita akan mengadakan transformasi. Dalam dualisme ekonomi, tidak akan ada keadilan sosial. Kita hidup dalam *human history* dan tidak dalam *natural history*.

Perubahan atau *Taghyir*

Menurut Kunto (1997, 104) Manusia adalah subjek sejarah. Bukan alam, hukum-hukum, bahkan bukan pula Tuhan. Sebuah ayat yang sering dikutip oleh Tjokroaminoto kemudian juga oleh Sukarno menjelaskan pentingnya manusia dalam sejarah. Dalam Surah Ar-Ra'd (13): 11 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ
 مَا هِيَ حَتَّىٰ يَغْيُرُوا مَا بِيَدِهِمْ
 بِإِذْنِهِ

"*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*".

Itu berarti bahwa peranan manusia yang berkesadaran sangat menentukan dalam perubahan, Kiranya jelas untuk Indonesia, tujuan sejarahnya ialah terbentuknya masyarakat pancasila. Dalam hal ini demokrasi Pancasila. Dari mana ke mana? Tidak salah kalau kita menyebut perubahan itu ialah dari demokrasi kapitalisme ke demokrasi Pancasila. Sejarah sudah mengajarkan bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam satu malam. Perubahan yang drastis . biaya sosialnya tinggi, dan k e b a n y a k a n korbannya *justu wong cilik* yang semestinya diuntungkan oleh perubahan itu.

Al-Quran menerangkan bahwa perubahan harus setahap demi setahap. Dalam Surah Al-insyiqaq (84): 19 disebutkan:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

"*Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)*".

Manusia dijadikan secara bertahap, maka demokratisasi pun harus juga terencana, melalui tahapan. Setiap orang yang masih punya hati nurani mesti menginginkan perubahan. Menurut Kunto (1997, hal. 105). Ada tiga kemungkinan cara perubahan: yaitu *change now*, perubahan sebagai proses bertahap dan sistematis, dan perubahan sebagai proses perlahan-lahan. Yang *pertama*, menunjukkan ketergesaan, biaya sosialnya tinggi, dan mungkin saja masyarakat tidak siap dengan perubahan mendadak, sehingga *counter productive*. Yang *kedua* perubahan yang dikehendaki mungkin tidak pernah terjadi, sebab kekuatan anti perubahan akan lebih suka status *quo*. Pilihan satu-satunya ialah cara *kedua*. Namun, kita wajib menghormati mereka yang menginginkan *change now*, sebab mereka telah menyediakan diri menjadi *tumbal* sejarah. Mereka juga mengimplikasikan bahwa bangsa Indonesia sudah *k e b e l e t* dengan perubahan, dan mungkin membuat kekuatan anti perubahan.

Penutup

Pembahasan seputar hubungan Islam dan demokrasi terus dilakukan para intelektual Barat dan muslim untuk menemukan satu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Sebagian ummat Islam meyakini, bahwa kata demokrasi tidak pernah dikenalkan dalam dunia Islam dan jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Tapi, sebagian besar lainnya percaya dan menerima kenyataan, bahwa ada kesamaan antara konsep demokrasi dengan ajaran

Islam. Kesamaan itu terletak pada dasar pemikiran demokrasi, yaitu musyawarah. Al-Qur'an dan as-Sunnah juga mewajibkan ummat Islam dan non-muslim untuk melakukan musyawarah dalam mengambil setiap keputusan.

Intelektual muslim Indonesia seperti Kuntowijoyo, berusaha menawarkan konsep demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis. Kunto memberikan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Islam yang dapat dihubungkan dengan ajaran Islam. Kaidah-kaidah tersebut adalah *ta'aruf, mashlahah, ta'awun, 'adl, taghyir*. bahwa praktik

demokrasi dalam Islam sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam nilai demokrasi. Konsep demokrasi yang coba ditawarkan Kunto mengambil jalan tengah dengan memadukan pemikiran Barat dan Islam.

Referensi

- Al – Quran dan Terjemahannya*, Revisi Depag Terbaru, 2007, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al – Quran, Penerbit Qomari, Departemen Agama.
- Effendy, Bachtiar. 2005 *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi dan Negara yang Tidak Mudah*. Ushul Press, Jakarta
- Hatamar, 2007. *Ilmu Politik Perspektif Barat dan Islam*, IAIN Raden Fatah, Palembang
- Kuntowijoyo, 1997. *Budaya dan Masyarakat*, P.T. Tiara Wacana, Maret Yogyakarta
- _____, 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan juli Bandung
- _____, 2006. *Raja Priyayi dan Kawula*. Pengantar J. Kadjat, Ombak, Hartojo Yogyakarta
- _____, 1998. *Paradigma Islam Interpretasi untuk aksi*. Editor A.E. Priyono, Mizan Bandung
- _____, 2006. *Maklumat Sastra Profetik* Grafindo Lentera Media, Hartojo Yogyakarta
- Lewis, Bernard, et.al. 2002. *Islam Liberalisme Demokrasi*. Para Madina, Jakarta
- M. Fahmi, 2005, *Islam Transendental Menelusuri Jejek-Jejak Pemikiran KuntoWijoyo*, Pilar Yogyakarta
- Maududi, Abu A'lah 1993 *Khilafah dan Kerajaan*. Mizan Bandung
- Idi Subandi Ibrahim, *Kuntowijoyo, Budayawan Profetik*, Pikiran Rakyat, Selasa 01 Maret 2014
- Agus Noor, *Tokoh yang Menghilang dalam Cerpen* Kompas, Minggu, 24 September 2013